

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. A. Oka dan Mahendra, 1996, *Menguak Masalah Hukum, DemokrasidanPertanahan*, SinarHarapan, Jakarta.
- AdamiChazawi, 2005, *PelajaranHukumPidana*, Raja GrafindoPersada, Jakarta
- AgusPriyanto, 2007, *JanganTungguLangitRuntuh*, JustikaSiarPublika, Jakarta
- BambangSunggono, 2013, *MetodologiPenelitianHukum*, RajaGrafindoPersada, Jakarta.
- BambangWaluyo, 1992, *ImplementasiKekuasaanKehakimanRepublik Indonesia*, Edisi 1 Cetakan 1, SinarGrafika, Jakarta
- _____, 2008, *PidanadanPemidanaan*, Cetakanke 3, SinarGrafika, Jakarta.
- Benhardlimbong, 2011, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Pustaka Margareta, Jakarta,
- BoediHarsono, 2003, *HukumAgraria Indonesia, HimpunanPeraturan-PeraturanHukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Chaerudin, dkk, 2009, *StrategiPencegahandanPenegakanHukumTindakPidanaKorupsi*, RefikaAditama, Bandung
- E.Y. Kanter , dan S.R Sianturi 1982, *Asas-AsasHukumPidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- LilikMulyadi, 2006, *Putusan Hakim dalamHukumAcaraPidana*, Citra AdityaBakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *KapitaSelektaSistemPeradilanPidana*, BadanPenerbitUniversitasDiponegoro, Semarang.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asasHukumPidana*, RinekaCipta, Jakarta.
- RomliAtmasasmita, 1995, *KapitaSelektaHukumPidanadanKriminologi*, MandarMaju, Bandung.

- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi ke 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Cetakan ke-2, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-7, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tina Asmarawati, 2015, *Pidanadan Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidanan dan Tindak dalam Rancangan KUHP*. ELSAM, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

C. SUMBER LAIN

Anfasa, Fariddkk 2014,
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Kedelai Bersubsidi, Universitas Lampung, Lampung.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta.

Septiadi, Wicipto 2018, 'Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi)', *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Volume 15, Nomor 3 November 2018.

Putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2016/Pn.Pdg